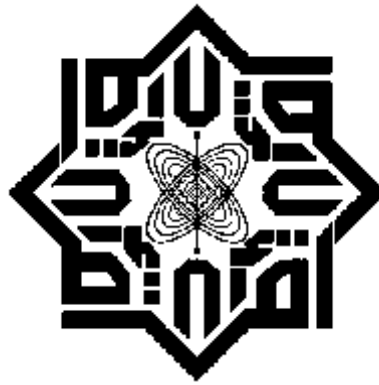


**ANALISIS PERKAWINAN POLIANDRI MENURUT HUKUM ISLAM  
(KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
KELAS I.A PEKANBARU NOMOR  
1186/PDT.G/2010/PA.PBR)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**P A R D I  
10621003720**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RIAU  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU  
2013**

## **ABSTRAK**

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang: bagaimanakah praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr, bagaimanakah akibat hukum perkawinan poliandri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr dan bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang perkawinan poliandri menurut putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, mengkaji, dan menganalisis praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr, mendiskripsikan akibat hukum perkawinan poliandri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang perkawinan poliandri menurut putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr. Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumentatif, yakni penelitian yang memfokuskan pada hasil putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr tentang Praktek Perkawinan Poliandri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr adalah dengan cara memalsukan akta cerai. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri Menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr adalah status anak yang hanya dinasabkan pada ibunya saja. Praktek poliandri dalam Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr antara Ibu Arneti binti Azim dengan Bapak Sardiono merupakan perkawinan yang haram. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan madllarat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1.A</b>	
<b>PEKANBARU .....</b>	<b>16</b>
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru .....	16
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru. ....	18
C. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Pekanbaru. ....	24
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN</b>	
<b>POLIANDRI.....</b>	<b>29</b>
A. Perkawinan.....	29
1. Defenisi .....	29
2. Dalil Hukum.....	33
3. Rukun dan Syarat .....	34
B. Poliandri .....	40

1. Defenisi Menurut Hukum Islam .....	40
2. Poliandri Menurut Undang-Undang.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr.....	46
B. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri Menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr .....	56
C. Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan yang dilakukan atas dasar penipuan Menurut Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr. ....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa berkembang biak. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini serba berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan.<sup>1</sup> Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat sangat teliti bahkan terperinci, dimana bertujuan untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas dasar pengabdian kepada Allah SWT sebagai Al-Kholiq (Tuhan Maha Pencipta), dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

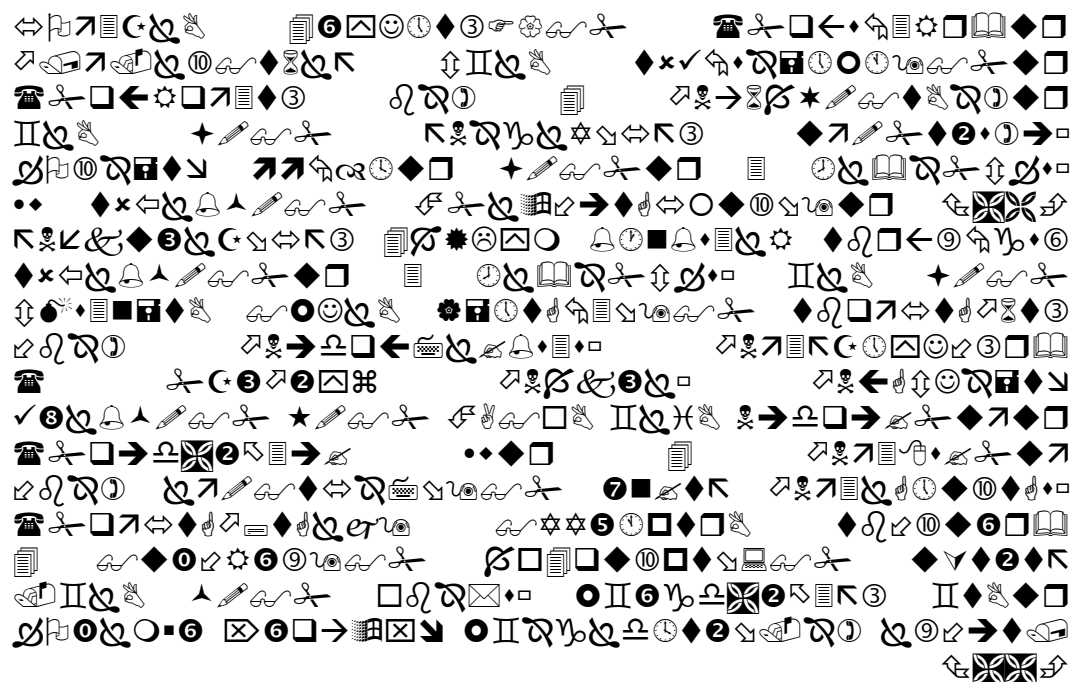
Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia baik pria maupun wanita secara naluriah disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta

---

<sup>1</sup> Imam Al Ghozali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan* (Bandung : Kharisma, 1995) h. 120

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2000) h 1.

kekayaan, dan lain-lain, juga mempunyai kecenderungan menyukai lawan jenisnya. Oleh sebab itulah, sekali lagi Islam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk melangsungkan sebuah hubungan lahir-batin. Jalan keluar tersebut terangkum dalam suatu ketentuan ikatan perkawinan, yang sesuai dengan firman Allah SWT., Q.S An- Nur 32-33:



Artinya: Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambasahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mmereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budaka-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya.,kepadamu,, dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (An-Nur : 32-33).

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa<sup>3</sup>.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu<sup>4</sup>.” Menurut isi Pasal 2 ayat (1) tersebut, perkawinan itu merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Ketentuan untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan perumusan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini <sup>5</sup>.

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain: <sup>6</sup>

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin;

---

<sup>5</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) h. 27

<sup>6</sup> Lihat Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhannya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena maksud perkawinan ialah supaya suami dan istri hidup bersama selama mungkin, maka sudah selayaknya bahwa syarat penting untuk perkawinan itu adalah persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua pihak<sup>7</sup>.

Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Poligami yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita. Islam membolehkan poligami, namun melarang poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki<sup>8</sup>.

Apabila Islam tidak mengharamkan poliandri, barangkali apa yang pernah terjadi pada masyarakat jahiliyah dulu akan terjadi pada masa kini. Dengan

---

<sup>7</sup> R Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1981) h 40

<sup>8</sup> .Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991) h. 119 - 120

diharamkannya poliandri jauh sejak berabad-abad lalu saja, aktivitas poliandri, walaupun terselubung itu masih saja terjadi, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru. Dari beberapa hal yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru, ada beberapa perkara yang diputuskan tentang pembatalan perkawinan. Hal ini terlihat dari Salinan Putusan Pengadilan Kelas 1-A Pekanbaru yakni Nomor: 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang pembatalan nikah antara M.Zen. M.Ag, sebagai penggugat melawan Arneti binti Azim sebagai Tergugat I dan Sardiono bin Ahmad Karno sebagai Tergugat II, Penggugat adalah Kepala KUA/PPN Kecamatan Sail Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Kapten Padilah Nomor 2 Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.

Untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Asfial sebagai suami dan arneti sebagai istri yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Nomor: Kk. 04.4/09/PW.02/XI/224/2010 tanggal 07 November 2010 yang telah bermatrai cukup dan nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepanitera pengadilan agama pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy akta nikah atas nama Asfial sebagai suami dan Arneti sebagai istri yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang pembatalan Perkawinan, h. 4-5

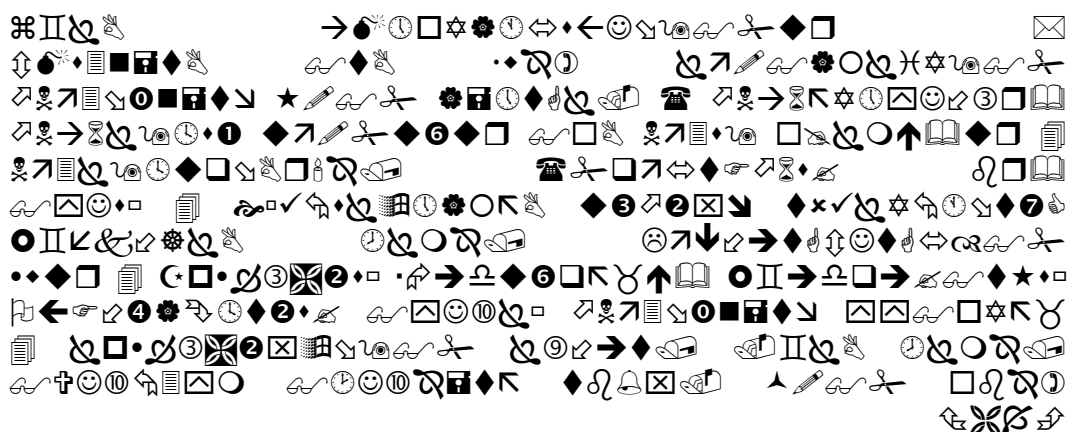
Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru Nomor: 445/51/VII/2006 tanggal 12 juli 2006 yang telah bermatrai cukup dan nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Asli duplikat akta nikah atas nama Sardiono sebagai suami dan Arneti sebagai istri yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru Nomor Kk. 04.4 / 06 / PW.01 / 112 / 2010 tanggal 04 Desember 2010 selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy duplikat akta nikah atas nama Sardiono sebagai suami dan Arneti sebagai istri yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru Nomor: Kk. 04.4 / 06 / PW.01 / 112 / 2010 tanggal 04 Desember 2010 yang telah bermatrai cukup dan nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy akta nikah atas nama Sardiono sebagai suami dan Arneti sebagai istri yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru Nomor: 66/08/V/2009 tanggal 04 mei 2009 yang telah bermatrai cukup dan nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPLKB/614/IV/2009/Bukit Raya tanggal 24 april 2009 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Bukit Raya selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Foto copy surat pernyataan sumpah oleh Tergugat I (Arneti) tertanggal 14 mei 2009 yang telah bermaterai cukup dan telah segel Pos serta dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

Hikmah perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak. Karena sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Menurut Hukum Waris Islam seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih janin dalam kandungan.

Perkawinan poliandri dalam Al- Qur'an secara tegas dilarang berdasarkan surat An- Nisa' ayat 24:



Artinya: Dan di haramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri- istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri- istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka

maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Adapun yang maksud dalam ayat diatas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami )<sup>10</sup>. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar’iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain<sup>11</sup>.

Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul: Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kasus perkawinan poliandri dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr ?
2. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan poliandri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr ?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang perkawinan yang dilakukan atas dasar penipuan dalam putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr ?

---

<sup>10</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta : Rajawali Pres, 2008) h.190-191

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (Bandung : Fokusmedia, 2007) h. 16

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendiskripsikan, mengkaji, dan menganalisis kasus perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr.
- b. Untuk mendiskripsikan akibat hukum perkawinan poliandri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.
- c. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang perkawinan yang dilakukan atas dasar penipuan menurut putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Hasil studi ini setidaknya dapat dapat memberi pengetahuan tentang kasus perkawinan poliandri dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr
- b. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
- c. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Pekanbaru.

## **D. Kerangka Teoritis**

Menurut Musfir al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu. Sebenarnya, dalam hal ini beberapa orang yang menyukai kelezatan biologis lebih menyukai bentuk ini.<sup>12</sup> Kesulitan terbesar dalam perkawinan poliandri, yang menyebabkan perkawinan ini tidak bolehkan bahkan diharamkan adalah bahwa tidak dikenalnya ayah si anak, walau kenyataannya medis bisa membuktikan, namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah status dalam masyarakat yang sosial. Anak sangat berperan penting dalam hal ini yang berujung pada sebuah hubungan keluarga.

Hubungan keluarga merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya, yang merupakan tuntutan naluriah watak manusia. Oleh sebab itu, andai terjadi poliandri maka hal itu sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama Islam, dan adat-Istiadat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi perempuan beserta keluarga.<sup>13</sup>

Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, dan bakti setia dari seorang pria padanya. Itulah salah satu alasan mengapa poliandri sebagaimana pelacuran selalu dibenci wanita. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan wanita.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) h. 32

<sup>13</sup> Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, (, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta 2007) h. 4

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 34-37

Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Mengingat poliandri bukanlah perkawinan yang mudah dilaksanakan, dan perlu pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya, bahkan diharamkan dalam hukum Islam. Namun kenyataannya kasus perkawinan poliandri masih saja terjadi seperti dalam perkara No.1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr yang diajukan oleh Kepala KUA/PPN Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Dimana Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara poliandri/perkawinan yang kedua dengan Tergugat II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Sail Pekanbaru tanggal 14 mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/08/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dengan menggunakan copy akte cerai di legas di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 30 april 2009 dengan alasan akta cerai asli hilang yang dinyatakan oleh surat keterangan hilang dari Polisi sesuai dengan bukti P.6. dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan oleh tergugat I dan tergugat II di KUA Sail tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan” azas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.



## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian dokumentatif, yakni penelitian yang memfokuskan pada hasil putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr tentang Kasus Perkawinan Poliandri

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran kasus perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr.

### **3. Sumber Data**

Adapun untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum yang dimaksud adalah putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum itu terdiri dari Literatur yang berkaitan dengan landasan hukum operasional hukum perkawinan terutama mengenai perkawinan poliandri, rancangan Undang-undang, buku teks (*teks books*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar hukum. Disamping itu juga didukung oleh berbagai artikel, dan data-data penunjang dari internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum yang dimaksud terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif yang menjelaskan praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr dan akibat hukum perkawinan poliandri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

#### 5. Teknik Penulisan

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya masing-masing. Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr diolah, dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Dari Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr di ambil kesimpulan umum mengenai pandangan hakim.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian ini, kemudian penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua mengupas gambaran umum Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru yang meliputi: sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama, susunan/struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru dan prosedur beracara di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bab ketiga adalah tinjauan teoritis tentang perkawinan poliandri yang meliputi: definisi perkawinan, rukun dan syarat dan definisi perkawinan poliandri.

Bab keempat adalah pembahasan, berisi tentang: jawaban dari semua rumusan masalah mengenai kasus perkawinan poliandri dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr, akibat hukum perkawinan poliandri menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr dan pandangan hukum Islam tentang perkawinan yang dilakukan atas dasar penipuan menurut putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

Bab kelima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr) serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat pembaca dan mereka yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1.A PEKANBARU**

#### **A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru**

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa alim ulama dan cendekiawan yang berada di Riau khususnya di Pekanbaru, maka diusulkanlah sebagai pimpinan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Pekanbaru. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit Tinggi, dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua pengadilan agama / Mahkamah Syari'ah Bukit Tinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Agama Jakarta pada tanggal 1 oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Pekanbaru, maka secara yuridis Pengadilan Agama Pekanbaru telah berdiri, dan atas dasar pelantikan tersebut, maka tanggal 1 oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian ada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru telah berumur 55 tahun.

Awal beroperasinya, Pengadilan Agama / Mahkamah syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat berkantor di jalan Rambutan tersebut meubeller yang ada hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru

berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970<sup>14</sup>.

Sepeninggal Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri<sup>15</sup>.

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari DRS.H.Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada DRS.H.Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak DRS. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama pekanbaru berpindah kantor di jalan pelanduk kecamatan sukajadi hingga april 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni DRS. Marjohan Syam (1988-1994),DRS. Abdulrahman HAR,SH (1994-1998). Drs. H. Lumban Hutabarat, SH, MH (2004-2006) DRS. H. Masruh (2007 – 2008). Drs. H. Taufiq Hamami (2009-2010) dan Drs. Abu Thalib Zisma (2011-sampai sekarang)

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs.H.Masrum Mh, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru.

---

<sup>14</sup> Efendi Siregar, dkk (tim penyusun), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru* (Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru: 2007) h.4

<sup>15</sup> *Ibid*, h.6

Perjalanan panjang perjuangan menuju Eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs.H. Herman Abdullah MM, yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protocol Muspida dan memberi Fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru<sup>16</sup>.

Kini sejak tanggal 1 juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, telah menjadi satu atap dibawah Makamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara Factual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

## **B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru.**

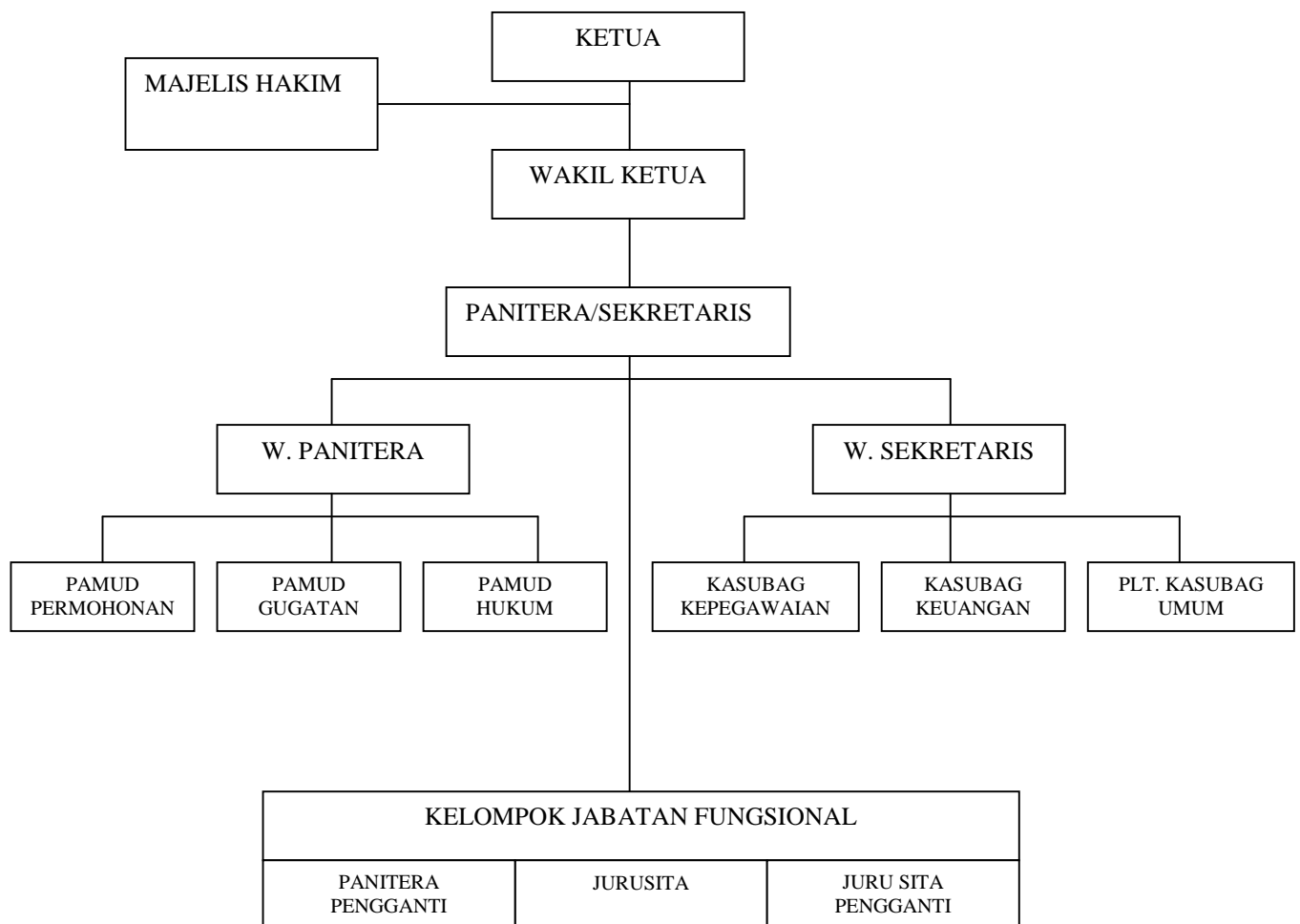
Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang mempunyai struktur organisasi tertentu. Struktur organisasi Pengadilan Agama

---

<sup>16</sup> *Ibid*,

Pekanbaru terdiri dari ketua, dan wakil ketua, majelis hakim, panitera/sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, kelompok fungsional kepaniteraan yang terdiri dari panitera pengganti dan jurusita. Mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

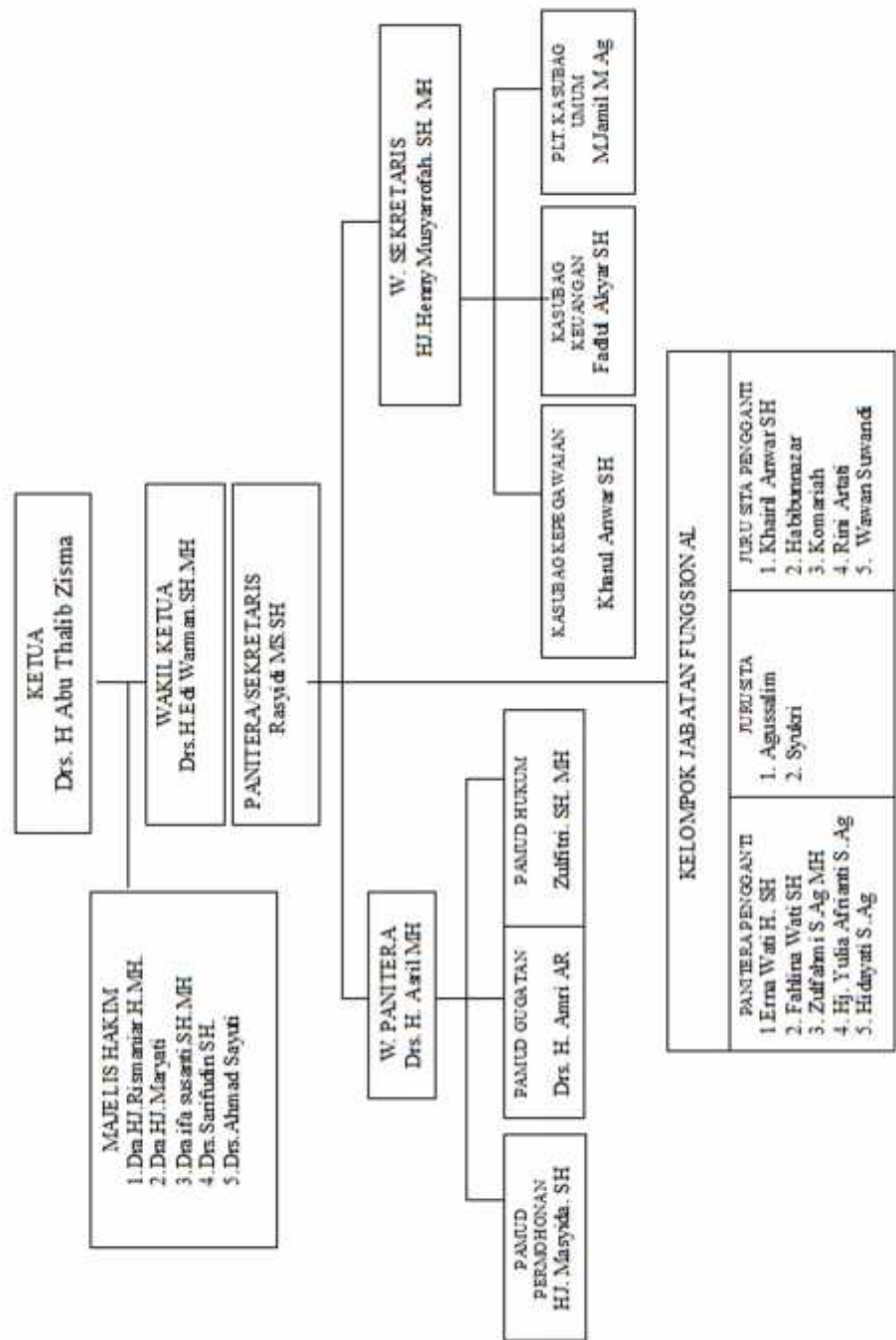
### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru



<sup>17</sup> Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru



Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru



Adapun tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru di atas, sebagai berikut:

1. Ketua bertugas memimpin instansi dari seluruh pegawai, mengambil kebijakan, mengarahkan untuk tercapainya tujuan pengadilan baik di bidang fungsional maupun dalam struktural. Di samping sebagai ketua majelis hukum dibantu oleh wakil ketua bertanggung jawab kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung atas terselenggaranya peradilan.
2. Wakil ketua bertugas mendampingi ketua dan menggantikan ketua apabila ketua berhalangan atau tidak berada di tempat. Wakil ketua membawahi pengawas bidang yang bertanggung jawab kepada ketua di samping ketua majelis hakim.
3. Hakim pengawas bidang, yaitu hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengawasi tugas dan fungsi pengelola apakah sudah sesuai dengan petunjuk aturan pola bindalmin dan administrasi kesekretarian dan bertanggung jawab kepada wakil ketua.
4. Hakim bertugas melaksanakan persidangan, menerima, menolak, menggugurkan, memutuskan dalam sebuah keputusan atau penetapan dibantu oleh panitera sidang dan jurusita pengganti.
5. Panitera / sekretaris membawahi bidang kepaniteraan, struktural dalam menjalankan fungsinya agar urusan perkara dapat berjalan menurut pola bindalmin. Sebagai kuasa pengguna anggaran dalam bidang kesekretarian, panitera / sekretaris dibantu oleh wakil panitera dan wakil dalam menjalankan

tugasnya bertanggung jawab pada pada ketua disamping disamping sebagai panitera sidang.

6. Wakil panitera membawahi 3 (tiga) panitera muda ( dibidang hukum, gugatan permohonan) untuk mengkoordinir semua perkara yang masuk dan yang putus dan juga mengkoordinir semua lopran perkara yang masuk dan yang putus dan juga mengkoordinir semua laporan perkara serta penjahitan arsip perkara dan sebagai panitera sidang.
7. Wakil sekretaris bertugas menyelesaikan urusan kesekretariatan membawahi 3 (tiga) kepala urusan ( kaur. Umum, kaur). Kepagawain dan ortala dan kaur. Perencanaan dan keuangan). Wakil sekretaris juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan kantor.
8. Panitera muda hukum, sesuai dengan pola bindalmin meja 3, bertugas membuat laporan bulanan, tahunan (SIADPA), menjilid berkas perkara yang telah diminutasi, menyerahkan akta cerai, mengarsipkan berkas serta sebagai panitera sidang.
9. Panitera muda gugatan, sesuai dengan pola bindalmin meja 1 bertugas menerima perkara, menaksir dan memberi nomor, mencatat dalam buku register dan menaikkan perkara ke panitera. Setelah selesai disidangkan (diputus) oleh hakim, dicatat kembali dalam buku register, serta sebagai panitera sidang.
10. Panitera muda gugutan, sesuai dengan pola bindalmin meja 1 bertugas menerima perkara, menaksir dan memberi nomor, mencatat dalam buku

register dan menaikan perkara kepanitera. Setelah selesai disidangkan ( diputus) oleh hakim, dicatat kembali dalam buku register, serta sebagai panitera sidang.

11. Panitera pengganti bertugas menerima berkas perkara dari panitera, membantu meneliti dan melengkapi administrasi perkara, mempersiapkan pelaksanaan persidangan, menyerahkan berkas perkara yang diputus dan diminutasi kepada panitera muda hukum, membantu menyiapkan data perkara untuk laporan dan kemudian bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada panitera.
12. Jurusita bertugas melaksanakan semua perintah ketua majelis sidang, menyampaikan surat kepada pihak-pihak berperkara, melakukan penyitaan/ekseklusi dan mempertanggung jawabkannya kepada ketua Pengadilan Agama, melakukan tugas pelaksanaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, membuat berita acara penyiaran dan berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
13. Jurusita pengganti bertugas melaksanakan perintah ketua mejelis sidang, membuat dan menyampaikan surat panggilan dan surat pemberitahuan kepada pihak-pihak perkara.
14. Kepala urusan umum bertugas memimpin pelaksanaan urusan umum, membagi tugas staf urusan umum serta memantau pelaksanaan tugas bawahan, menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang surat menurut, perlengkapan alat tulis kantor, perpustakaan, membuat laporan

IKMN, membuat Inventaris, DIR, pembukuannya serta pengurusan penghapusannya dan memelihara kantor.

15. Kepala urusan kepegawaian dan ortala bertugas melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan kepegawaian, mengumpulkan dan mengirim data kepegawaian, membuat surat usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, DP3, KP4, dan SIMPEG.
16. Kepala urusan perencanaan dan keuangan, pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan surat-surat keuangan, pembuatan DIPA, laporan-laporan keuangan (SAI) dan RKAKAL, dan penandatanganan SP.
17. Bendara penerima bertugas sebagai bendahara pengelolaan uang panjar biaya perkara, mendistribusikan dan mencatat dalam buku kas Bantu, buku registrasi dan buku jurnal, serta menyetorkan uang HHK. PNPB.
18. Bendahara pengeluaran (bendahara rutin) bertugas mengambil dana, gaji, dan keperluan kantor serta membukukannya dalam buku kas.

### **C. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Pekanbaru.**

#### **1. Pendaftaran**

Adapun penjabaran tentang tatacara pendafrtan perkara adalah sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan, dengan dilengkapi:
  - a. Identitas bukti diri secara lengkap dan benar

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1.A Pekanbaru

- b. Menunjukkan surat pengantar dari kelurahan di mana ia bertempat tinggal.
  - c. Bukti-bukti perkara yang diajukan.
  - d. Surat-surat yang mendukung
  - e. Membayar biaya perkara.
2. Cara pengajuan perkara:
- a. Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, sebanyak para Pihak yang terlibat ditambah dengan 4 (empat) rangkap untuk kelengkapan berkas.
  - b. Pencari keadilan dapat dibantu oleh Petugas Pengadilan Agama untuk merumuskan Permohonan/Gugatan bagi yang tidak dapat tulis baca ;
  - c. Petugas Meja Pertama menerima perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke II Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sesuai dengan besar Biaya perkara yang ditetapkan oleh SK Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : W4.A1/ /HK. /VII/2010 Tanggal
  - d. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.

- e. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237 – 245 HIR.
- f. Biaya menyangkut proses perkara ini akan dibebankan kepada DIPA sepanjang biaya tersebut tersedia ;
- g. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- h. Dalam hal ini kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat kediaman tergugat.
- i. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

### 3. Pemanggilan

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang disamakan dengannya. Dan panggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.

- b. Yang melakukan panggilan tersebut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.
- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugatan.
- d. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mas media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- e. Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

#### 4. Persidangan

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteran khusus bagi gugatan yang tempat tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan pembatalan itu.
- b. Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan



membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnmya maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN POLIANDRI**

##### **A. Perkawinan**

###### **1. Defenisi**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>18</sup>

Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia, dalam setiap ajaran agama tujuannya bukan saja untuk menyalurkan insting seksual manusia dan meletakkannya pada jalan yang benar, tetapi berfungsi juga sebagai sarana reproduksi manusia untuk mengagungkan dan menaati perintah Tuhan sesuai dengan tugas manusia. Dalam referensi lain disebutkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>19</sup>

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat

---

<sup>18</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001, hal. 3).

<sup>19</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hal. 2)

berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.<sup>20</sup>

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan Ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Islam juga menganjurkan agar menempuh hidup perkawinan.<sup>22</sup> Namun demikian, agar pernikahan yang akan dilaksanakan diharapkan nantinya menjadi sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah bias tercapai, maka hal-hal yang mendukungnya harus dipersiapkan juga. Mengingat betapa besarnya tanggung jawab, baik suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik psikis maupun fisik.

---

<sup>20</sup> Haliman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (bandung: CV. Mandar Maju, 1990, hal 10).

<sup>21</sup> M.Idris Ramuliyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004, hal.1)

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyr, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UI Press, 1999, hal 12)

Adapun makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengungkapkan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwij* yang artinya nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *Wathaa* yang artinya bersetubuh.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabillah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inkah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>23</sup>

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang

---

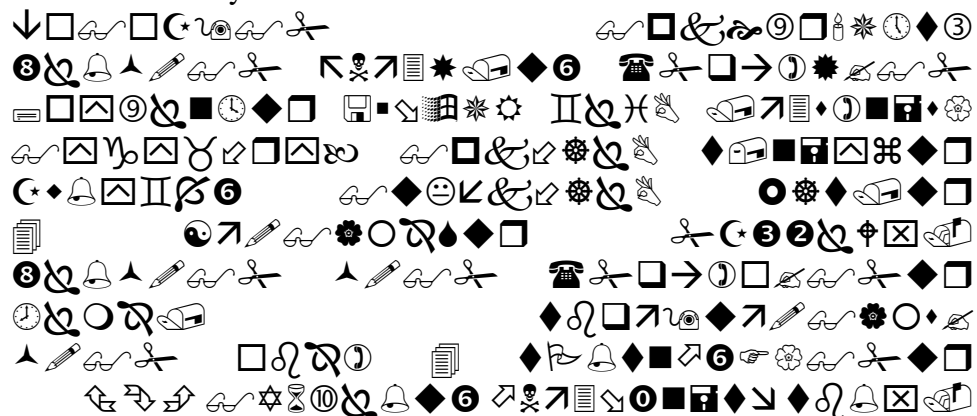
<sup>23</sup> Slamet Abiding Aminuddin, *Fiqh Munaqahat* 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999, hal 10-11)

demikian lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnat. Demikian menurut kesepakatan Imam madzhab.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian perkawinan diatas, terdapat kesimpulan dan inti yang sama walaupun mereka menggunakan bahasa yang berbeda, yaitu nikah merupakan suatu akad yang mana dengan akad tersebut dapat menghalalkan hubungan seksual agar eksistensi kehidupan manusia di dunia ini bisa terus berlanjut dan mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban di antara keduanya dan memiliki seperangkat aturan yang harus dipenuhi.

Sumber pokok pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang di dalamnya telah di atur tentang pedoman pelaksanaannya. Adapun dalam ayat Al-Quran antara lain adalah:

1) Surat An-Nisa' ayat 1:



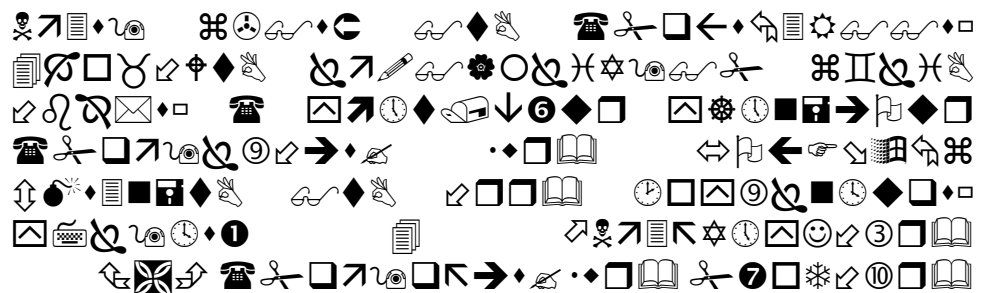
Artinya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada*

<sup>24</sup> Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Damsyiqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Hasyimi press, 2001, hal. 341)

*Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”<sup>25</sup>

## 2) Surat An-Nisa’ ayat 3



Artinya:

*“...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,<sup>26</sup> maka (kawinilah) seorang saja<sup>27</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

## 2. Dalil Hukum

Al-Qur’an menjelaskan, bahwa manusia baik pria maupun wanita secara naluriah disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan, dan lain-lain, juga mempunyai kecenderungan menyukai lawan jenisnya. Oleh sebab itulah, sekali lagi islam memberikan jalan keluar yang terbaik untuk melangsungkan sebuah hubungan lahir-batin. Jalan keluar tersebut

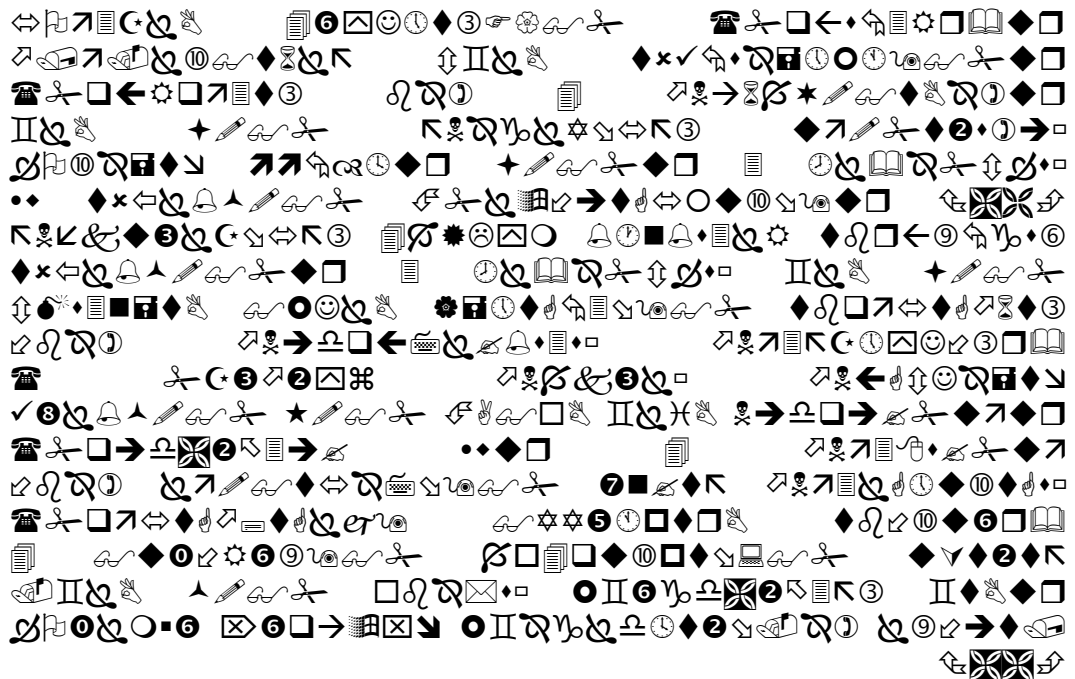
<sup>25</sup> Departemen Agama RI, 2000, *al-Qur’an dan Terjemahannya* : juz 4, 114

<sup>26</sup> Berlaku adil ialah kelakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Ibid, 115

terangkum dalam suatu ketentuan ikatan perkawinan.yang sesuai dengan firman

Allah SWT., Q.S An- Nur 32-33:



Artinya: Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mmereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budaka-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikan kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi, dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (An-Nur : 32-33).

### 3. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang berhubungan dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala

unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan demikian rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu' dan akad dalam nikah. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutupi aurat dalam sholat dan calon pengantin harus beragama Islam dalam perkawinan.<sup>28</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun perkawinan terdiri dari :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul<sup>29</sup>.

Berbeda halnya dengan Ulama Hanafiyah, menurutnya rukun nikah itu hanyalah ijab dan qabul saja. Ijab dan qabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam suatu perkawinan. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti mengikatkan diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak lain yang menyatakan dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Karena ijab dan qabul merupakan manifestasi dari kerelaan hati.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ,(Damsiq:Daral-Fikr,1984), juz IX , h. 36

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*



Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijihad para ulama, yaitu :

- (1) Calon suami beragama Islam
- (2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- (3) Orangny diketahui dan tertentu
- (4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon isteri. Maksudnya tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan.
- (5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- (6) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti sedang dalam ihram dan sedang mempunyai isteri empat.<sup>31</sup>

b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996), jilid IV, h.1331-1334

6) Tidak dipaksa/ikhtiyar

7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah<sup>32</sup>

2. Syarat-syarat ijab qabul<sup>33</sup>

a. Ijab dan qabul itu dilafalkan oleh orang yang baligh dan berakal atau dalam istilah hukum disebut orang yang cakap bertindak hukum. Apabila salah satu pihak tidak cakap hukum, maka ijab dan kabulnya dihukum sah apabila diwakili oleh walinya. Misalnya, laki-laki yang bodoh atau dungu. Akad nikah laki-laki seperti itu sah apabila akad nikahnya diwakili oleh wali atau seseorang yang dianggap sah mewakilinya.

b. Ijab dan kabul harus dilafalkan pada satu majlis.

Maksudnya, antara ijab dan kabul tidak diselingi dengan persoalan lain atau sesuatu adat istiadat setempat yang dianggap tidak dalam satu majelis lagi. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah ijab harus diucapkan segera setelah ijab. Dengan kata lain, antara ijab dan kabul tidak mempunyai tenggang waktu yang cukup lama; ukuran lama ini diserahkan kepada adat istiadat setempat. Akan tetapi, Ulama Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan berapa lama setelah ijab, dengan syarat tidak bersamaan dengan pembicaraan yang membuat ijab tersebut batal, maka hukumnya tetap boleh selama kedua belah pihak masih berada dalam satu majelis (tempat dan suasana).

c. Kabul tidak berbeda dengan ijab, kecuali dalam hal-hal yang sifatnya lebih baik dan lebih sempurna. Contoh: wali dari pihak perempuan

---

<sup>32</sup> *Ibi.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*

mengucapkan ijab; saya nikah engkau dengan si Halimah binti husen dengan mas kawin sebetuk cincin. Lalu kali-laki mengucapkan kabul:” saya terima nikah Halimah binti Husen dengan mahar sebetuk cincin dan kalung”. Dalam kasus seperti ini, menurut ulama fiqh hukumnya sah, karena kabul telah mencakup kandungan ijab. Sedangkan kelebihan yang diucapkan dalam kabul merupakan kelebihan yang bermanfaat dan lebih baik. Berbeda halnya bila mahar yang disebutkan dalam kabul lebih kecil daripada yang diucapkan dalam ijab; ijab kabul seperti ini tidak sah.

- d. Orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya sebelum qabul diucapkan, atau tidak menunjukkan sikap berpaling dari suasana ijab sebelum kabul diucapkan. Contohnya, setelah menyatakan ijab dan sebelum kabul diucapkan pihak kedua, wali berbicara dengan orang lain; dalam kasus seperti ini, akad tersebut dianggap batal.
- e. Kedua belah pihak mendengar ijab dan qabul itu secara jelas dan memahami maksudnya dengan baik
- f. Ijab dan qabul itu bersifat tuntas atau tidak dikaitkan dengan syarat lainnya yang dapat membatalkan akad tersebut. Misalnya, seorang wali mengatakan :” Saya nikahkan anak saya dengan engkau besok, atau saya nikahkan engkau dengan anak saya Husna, apabila abangnya datang besok”. Menurut kesepakatan ulama Fiqh, akad nikah seperti ini tidak sah karena dikaitkan dengan syarat dan waktu tertentu.

### 3. Syarat-syarat wali<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Orang-orang yang berhak menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Wali hendaklah seorang laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها

Artinya: “Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.”<sup>35</sup>

2. Muslim, seorang wali dalam akad nikah dalam Islam harus beragama Islam, pada gilirannya non muslim tidak sah menjadi wali nikah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam surat Ali Imran ayat 28 :

لَا يَجُوزُ لِلْمُكْمِنِينَ الْإِيمَانُ إِلَّا بِأَن يَكُونُوا يَتَّبِعُونَ الْإِسْلَامَ وَبِأَن يَكُونُوا يَتَّبِعُونَ الْإِسْلَامَ وَبِأَن يَكُونُوا يَتَّبِعُونَ الْإِسْلَامَ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia pertolongan Allah”.

3. Baligh dan berakal, artinya anak kecil atau gila tidak berhak menjadi wali.

Ini didasarkan dengan hadis Nabi SAW.

4. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memlihara maruah atau sopan santun. Keharusan adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadis dari Aisyah menurut riwayat Dar al-Quthniy:

لا نكاح الا بولي شاهدي عدل.

<sup>35</sup> Assanna’ani, *Op.Cit.*h. 120

*Artinya: Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.*<sup>36</sup>

5. Tidak sedang mengerjakan ihram, untuk haji atau untuk umrah, hal ini berdasar hadis Nabi SAW dari ‘Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan:

*Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.*<sup>37</sup>

Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi saw.

لا نكاح الا بولي (رواه الخسائي)

*Artinya: “tidak sah perkawinan tanpa wali”*<sup>38</sup>

Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi; sedangkan Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam.<sup>39</sup>

4. Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar dan mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafiyah dan Hanabilah, boleh juga saksi itu satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan menurut Hanafiyah,

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h.118

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*,h.117

<sup>39</sup> *Ibid.*

boleh dua orang buta dan dua orang fasik (tidak adil), orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

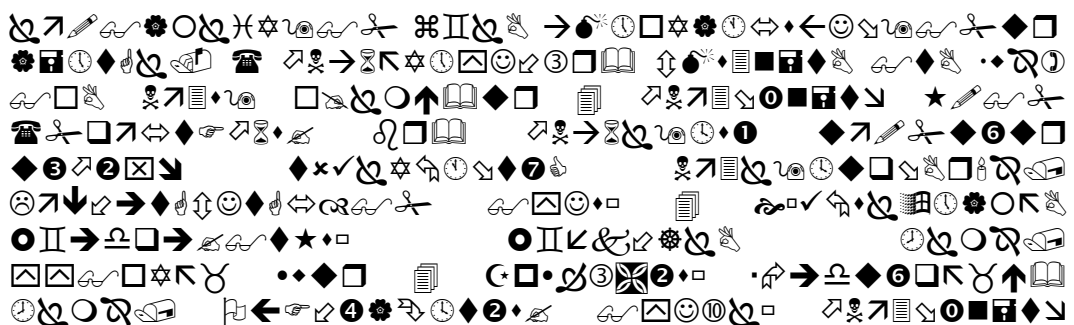
1. Berakal, bukan orang gila
2. Baligh, bukan anak-anak
3. Merdeka, bukan budak
4. Islam
5. Kedua orang saksi itu mendengar

## B. Poliandri

### 1. Poliandri Menurut Hukum Islam

Menurut Musfir al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu. Sebenarnya dalam hal ini beberapa orang yang menyukai kelezatan biologis lebih menyukai bentuk ini.<sup>40</sup>

Perkawinan poliandri dalam Al- Qur'an secara tegas dilarang berdasarkan surat An- Nisa' ayat 24:



<sup>40</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) h. 32



Artinya: Dan di haramkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari istri- istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri- istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”

Adapun yang maksud dalam ayat diatas adalah wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami )<sup>41</sup>.

Menurut ayat diatas yaitu bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang,<sup>42</sup> yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Oleh karena itu, diharankanlah mereka nikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain<sup>43</sup>.

Kesulitan terbesar dalam perkawinan poliandri, yang menyebabkan perkawinan ini tidak bolehkan bahkan diharamkan adalah bahwa tidak dikenalnya ayah si anak, walau kenyataannya medis bisa membuktikan, namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah status dalam masyarakat yang sosial. Anak sangat berperan penting dalam hal ini yang berujung pada sebuah hubungan keluarga.

---

<sup>41</sup> H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta : Rajawali Pres, 2008) h.190-191

<sup>42</sup> M.Ali Ash- shobuni, *perkawinan Islam*, terj. Ahmad Nurrahim ( Solo : Mumtaza, 2008) h. 66

<sup>43</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj.As'ad Yasin dkk, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) h. 322

Hubungan keluarga merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya, yang merupakan tuntutan naluriah watak manusia. Oleh sebab itu, andai terjadi poliandri maka hal itu sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama Islam, dan adat-istiadat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi perempuan beserta keluarga.<sup>44</sup>

Status perkawinan poliandri bila di lihat dari berbagai segi, maka akan menimbulkan masalah dalam diri pribadi maupun sosial, salah satunya adalah:<sup>45</sup>

1. Sudut Pandang Psikologis.

Hubungan Perkawinan tidak hanya terbatas pada soal material dan fisik saja. Artinya, tidak hanya terbatas pada urusan kebendaan dan keuangan semata. Sekiranya demikian, maka poliandri tidak dapat dibenarkan, sebab semua itu akan menjadi milik bersama oleh banyak individu, dan masing-masing dapat diberi bagiannya. Sebuah hubungan perkawinan yang paling utama dan merupakan aspek yang mendasar adalah aspek spiritual dan emosional yaitu cinta dan perasaan. Fokus persatuan dalam sebuah perkawinan suami istri adalah hati. Cinta dan perasaan tidak dapat di distribusikan juga tidak dapat di pecah-pecah dan di bagi-bagi.

Sungguh benar adanya, bahwa jiwa yang sebenarnya dari sebuah perkawinan ialah perasaan dan sentimen, dan juga benar adanya bahwa emosi juga sangat mempengaruhi. Oleh sebab itu, melihat dari keadaan yang sesungguhnya bahwa dari sudut psikologi keluarga, maka perkawinan semacam

---

<sup>44</sup> Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, ( Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007) h. 4

<sup>45</sup> Murtadha Muthahhari, *Ibid*, h. 16-120



ini sangat bertentangan. Psikologi, kejiwaanlah yang terkadang sangat mendominasi. Psikologi dari seorang suami bahkan psikologi seorang anak yang dilahirkan, dimana sangat terkait dengan masalah mental dan emosional manusia.

## 2. Sudut Pandang Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dimana dalam sebuah keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak. Pendidikan yang baik, maka akan menciptakan suasana yang tentram. Pendidikan yang paling dibutuhkan dalam sebuah keluarga itu pada nyatanya adalah pendidikan berupa spiritual (agama).

Akan tetapi, jika pendidikan ini salah maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, andai seorang Ibu memberi contoh dengan jalan berpoliandri, maka barang tentu akan memberi dampak pada keberlangsungan pemikiran anak-anaknya nanti. Bagaimanapun pendidikan adalah hal yang paling utama dan pertama harus diberikan pada seluruh anggota keluarga.

## 3. Sudut Pandang Moral

Islam mengatakan, bahwa watak asli manusia memiliki hak dan batasan dimana dalam hak dan batasan itu harus mampu di pahami. Watak manusia memberontak dan gelisah sebagai akibat dari dua faktor. Faktor pertama adalah kekosongan. Faktor kedua adalah pemberian kebebasan yang penuh, dengan menyingkirkan segala halangan dan batasan. Oleh karena itu, poliandri adalah salah satu perbuatan amoral, baik bertentangan dengan hukum Islam maupun

bertentangan dengan kehidupan sosial (masyarakat), dimana tentunya ada pemberontakan nurani yang menyertai.

#### 4. Sudut Pandang Hak

Sebenarnya, dengan akad perkawinan, suami dan istri terpaut satu sama lain dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan kepuasan adalah timbal balik. Artinya, masing-masing pihak sama berhak atas segala manfaat yang datang dari pihak lain. Atas dasar ini, maka apabila si istri menikah dengan laki-laki lain bagaimanapun alasannya, maka orang pertama yang mempunyai hak untuk berbicara dari hati ke hati adalah suami dan anak yang dihasilkan dari akad perkawinan.

#### 5. Sudut Pandang Falsafah

Pandangan falsafah terkait dengan perkawinan poliandri dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum Islam dan kehidupan kemasyarakatan. Basis falsafah Islam dalam hal ini sebenarnya hanya memberikan kemudahan bagi seorang wanita (Istri) untuk bisa membentuk sebuah keluarga yang harmonis, yang beretika keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Islam sangat konsisten dengan falsafahnya, dimana Islam mengharap setiap pasangan suami istri mampu mengukuhkan tali cinta menjadi keluarga Islami seutuhnya.

Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, dan bakti setia dari seorang pria padanya. Itulah salah satu alasan mengapa poliandri sebagaimana pelacuran selalu dibenci wanita.

Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan wanita.<sup>46</sup>

## **2. Poliandri Menurut Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing<sup>47</sup>. Dengan demikian, dalam konteks Hukum Perdata, perkawinan merupakan pluralisme hukum. Dalam rangka untuk memfasilitasi pluralisme hukum perkawinan ini. Bagi masyarakat yang beragama Islam, perkawinan dilaksanakan oleh institusi KUA, sedangkan bagi agama non Islam, dilaksanakan oleh institusi Kantor Catatan Sipil. Kendatipun demikian, asas yang paling dominan dalam perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 adalah monogami yang terbuka, dalam artian masih dimungkinkan terjadinya perkawinan poligami dengan persyaratan yang limitatif.

Dalam Pasal 1 UU No 197424, prinsip monogami ini, menjadi asas yang fundamental dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, sehingga berbagai bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip monogami, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif, adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>46</sup> Murtadha Muthahhari, *Ibid*, h. 34-37

<sup>47</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.**

Praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr adalah Tergugat I Arneti binti Azim, beralamat di Jl. Nuri III Gang Nusantara Nomor 227 melangsungkan perkawinan secara poliandri/perkawinan yang kedua dengan Tergugat II Sardiono, beralamat MS. S. Parman Gang Al-Khalis Nomor 29 RT.02, RW. 04 Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru tanggal 14 mei 2009. Pernikahan Tergugat I dengan Asfial Bin Rifa'i yang merupakan mantan suami Arneti dilangsungkan di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 9 Juli 2006 dengan akta nikah Nomor: 445/51/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006 memiliki 2 orang anak.

Tergugat I Arneti binti Azim menikah kembali dengan mantan suami pertamanya, bernama Asfial Bin Rifa'i dengan menggunakan akta cerai yang asli Nomor: 274/AC/2004/PA.Pbr tanggal 24 September 2004, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I Arneti binti Azim menggunakan copy akte cerai di legas di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 30 April 2009 dengan alasan akta cerai asli hilang yang dinyatakan oleh surat keterangan hilang dari polisi.

Pada tanggal 15 Oktober 2010 Tergugat II baru mengetahui bahwa istrinya telah hidup serumah dengan bekas suaminya tersebut dan melaporkan kepada KUA/PPN Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Untuk lebih jelasnya posisi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor: 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Penggugat adalah Kepala KUA/PPN Kecamatan Sail Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Kapten Padilah Nomor 2 Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
2. Tergugat I adalah Arneti binti Azim, beralamat di Jl. Nuri III Gang Nusantara Nomor 227 (Perumahan Sidomulyo) RT.02 RW.12 Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
3. Tergugat II adalah Sardiono, beralamat MS. S. Parman Gang Al-Khalis Nomor 29 RT.02, RW. 04 Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
4. Bahwa pada tanggal 14 mei 2009 Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru (Akta Nikah Nomor: 66/08/V/2009)

---

<sup>44</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang pembatalan Perkawinan, h 1-2

5. Bahwa Tergugat I janda dengan akta cerai Nomor: 274 / AC / 2004 / PA.Pbr tanggal 24 september 2004 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru sedangkan Tergugat II duda, dengan akta cerai Nomor: 188/AC/2008/PA.Pbr Mei 2008 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru
6. Bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur persyaratan nikah diantaranya:<sup>45</sup>
  - Surat keterangan untuk nikah, model N.1
  - Surat keterangan asal-usul, model N.2
  - Surat persetujuan mempelai, model N.3
  - Surat keterangan orang tua, model N.4
  - Surat pernyataan yang isinya benar tidak pernah memakai akta cerai asli
  - Tergugat I membuat surat pernyataan sumpah yang isinya benar seorang perempuan berstatus janda, dengan akta cerai hilang dan tidak pernah menggunakan akta cerai asli
  - Tergugat I melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian bahwa surat cerai benar telah hilang
7. Bahwa tergugat I telah berbohong kepada pihak KUA Sail dimana tergugat I telah menikah kembali dengan mantan suami pertamanya, bernama Asfial Bin Rifa'i dengan menggunakan akta cerai yang asli Nomor: 274/AC/2004/PA.Pbr tanggal 24 September 2004, dikeluarkan

---

<sup>45</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang pembatalan Perkawinan, h 2

oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat I menggunakan copy akte cerai di legas di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 30 April 2009 dengan alasan akta cerai asli hilang yang dinyatakan oleh surat keterangan hilang dari polisi.

8. Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Asfial Bin Rifa'i tersebut dilangsungkan di KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Propinsi Riau pada tanggal 9 Juli 2006 dengan akta nikah Nomor: 445/51/VII/2006 tanggal 12 Juli 2006.
9. Bahwa pernikahan Tergugat I dengan Asfial Bin Rifa'i tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2010 atas laporan Sardiono, dimana Tergugat I telah hidup serumah dengan bekas suaminya hingga sekarang dengan dasar akta nikah seperti posita di atas.
10. Bahwa karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di KUA Sail tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan” azas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.
11. Bahwa karena Penggugat sebagai PPN/Kepala KUA Sail sebagai pihak yang dirugikan secara hukum maka berdasarkan pasal 23 huruf

(c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat membatalkan perkawinan tersebut.

12. Bahwa karena perkawinan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diluar ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan Pasal-Pasal tersebut di atas maka penggugat selaku Pejabat Pembuat Akta Nikah, dapat membatalkan perkawinan tersebut di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana kehendak Pasal 37 dan 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:<sup>46</sup>

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat tersebut.
2. Menetapkan batal perkawinan Tergugat I (Arneti Binti Azim) dengan Tergugat II (Sardiono Binti Ahmad Karno) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Pekanbaru-Riau, tanggal 14 Mei 2009.
3. Menyatakan Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah (akta nikah Nomor: 66/08/V/2009) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru tidak berkekuatan hukum
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

---

<sup>46</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang Pembatalan Perkawinan, h.3-4



Pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II pada sidang pertama, dan kedua tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara relas panggilan tanggal 04 januari 2011 dan 20 february 2011 untuk Tergugat I dan 21 januari untuk Tergugat II tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan namun Tergugat tidak hadir, dan ketidak hadiran tergugat tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Baik Tergugat I maupun Tergugat II telah dipanggil secara sepatutnya untuk menghadap di persidangan pada hari-hari yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat didengar keterangan-keterangannya;

Untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah diajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : <sup>47</sup>

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Asfial sebagai suami dan arneti sebagai istri yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Nomor: Kk. 04.4/09/PW.02/XI/224/2010 tanggal 07 November 2010 yang telah bermatrai cukup dan nazedelen pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepanitera

---

<sup>47</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang pembatalan Perkawinan, h. 4-5

pengadilan agama pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Foto copy akta nikah atas nama Asfial sebagai suami dan Arneti sebagai istri yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru Nomor: 445/51/VII/2006 tanggal 12 juli 2006 yang telah bermatrai cukup dan nazegelel pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Asli duplikat akta nikah atas nama Sardiono sebagai suami dan Arneti sebagai istri yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru Nomor Kk. 04.4 / 06 / PW.01 / 112 / 2010 tanggal 04 Desember 2010 selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy duplikat akta nikah atas nama Sardiono sebagai suami dan Arneti sebagai istri yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru Nomor: Kk. 04.4 / 06 / PW.01 / 112 / 2010 tanggal 04 Desember 2010 yang telah bermatrai cukup dan nazegelel pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy akta nikah atas nama Sardiono sebagai suami dan Arneti sebagai istri yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru Nomor: 66/08/V/2009 tanggal 04 mei 2009 yang telah bermatrai cukup dan nazegelel pos serta telah

dilegalisir oleh pejabat Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang Nomor: STPLKB/614/IV/2009/Bukit Raya tanggal 24 april 2009 yang dikeluarkan oleh Kapolsek Bukit Raya selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy surat pernyataan sumpah oleh Tergugat I (Arneti) tartanggal 14 mei 2009 yang relah bermatrai cukup dan natseglen Pos serta dilegalisir oleh Kepanitera Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

Penggugat mengajukan saksi-saksi di bawah ini, di mana para saksi tersebut telah disumpah :<sup>48</sup>

a. Saksi I

1. Saksi kenal dengan penggugat
2. Saksi kenal Tergugat I karena pada saat Tergugat I nikah dengan Tergugat II saksi sebagai saksi pernikahan tersebut;
3. Tentang pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang saksi ketahui adalah Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan surat cerai yang dilegalisir oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, dan pada saat Tergugat I menikah dengan Tergugat II selaku saksi Tergugat I dalam keadaan janda dimana sebelumnya Tergugat I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asfial, akan tetapi terakhir ini saksi mendengar kalau Tergugat I telah rujuk kembali dengan mantan suami pertamanya;

---

<sup>48</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang pembatalan Perkawinan, h. 5-6

4. Saksi tahu kalau Tergugat I telah menikah kembali dengan mantan suami pertamanya Asfial (suami pertama Tergugat I) dan Asfial yang memberitahukan ke KUA Sail;
5. Saksi tidak tahu persis tahun berapa Tergugat I menikah kembali dengan mantan suami pertamanya tetapi menurut cerita dari Asfial (suami pertama Tergugat I) pada saat memberitahukan ke kantor KUA Sail, bahwa mereka rujuk kembali pada tahun 2006 dan nikah dengan Sardiono (Tergugat II)

b. Saksi II

1. Saksi kenal Tergugat I bernama Arneti, karena pada saat Tergugat I nikah dengan suami pertamanya (Asfial) tahun 2006 saksi sebagai saksi pernikahan mereka sedangkan dengan Tergugat II (Sardiono) saksi tidak kenal;
2. Saksi tahu kalau Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II pada saat Tergugat II melapor kepada KUA Marpoyan Damai yang menyatakan bahwa Tergugat I telah hidup serumah dengan mantan suaminya Asfial, pada saat itu Tergugat II menyatakan kepada KUA marpoyan damai bahwa ia adalah suami sah dari Tergugat I yang menikah di KUA Sail dengan memperlihatkan buku Kutipan Akta Nikah yang resmi yang dikeluarkan oleh KUA Sail, kemudian kepala KUA Marpoyan Damai langsung melakukan kontak dan komunikasi dengan kepala KUA Sail untuk mengecek kebenaran Tergugat II;
3. Saksi mengetahui tentang pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan laporan tergugat tanggal 15 oktober 2010 dimana Tergugat II

(Sardiono) datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, dimana kedatangan Tergugat II melaporkan bahwa Tergugat I (Arneti) telah nikah kembali dengan mantan suaminya (Asfial). Sedangkan Tergugat I pada saat menikah dengan Tergugat II menyatakan bahwa ia dalam keadaan janda yang telah bercerai dengan suaminya (Asfial) pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan pada tahun 2009 dengan menggunakan foto copy akt cerai yang dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, dan menurut informasi dari kepala KUA saki terdugat I mengurus surat keterangan dari Kepolisian bahwa akte cerai aslinya hilang;

4. Saksi tahu kalau Tergugat I nikah kembali dengan mantan suaminya berdasarkan Catatan Akta Nikah yang ada di KUA Kecamatan Marpoyan Damai bahwa Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan mantan suami pertamanya pada tahun 2006;
5. Saksi tidak tahu dimana Tergugat I sekarang tinggal

Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan keterangan apapun lagi, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima kesaksian tersebut, selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan tetap pada gugatan semula. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Penggugat mengajukan pembatalan nikah atas pernikahan Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

**B. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri Menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 3 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka telah terbukti bahwa Tergugat I melakukan perkawinan dengan Tergugat II melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yang merupakan Ketentuan Hukum Negara yang berlaku umum, oleh karena itu gugatan Penggugat agar perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka patut untuk diterima dan dikabulkan.

Dengan adanya atau terjadinya pembatalan perkawinan tersebut maka, anak yang mengalami kerugian, padahal menurut pasal 42 Undang-Undang no. 1 tahun 1974, disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orang tuanya, sedangkan anak tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Kesulitan terbesar dalam poliandri ialah tidak diketahuinya ayah dari anak yang dilahirkan, sehingga dalam perkawinan model ini hubungan antara ayah dan anak tidak pasti. Sebagaimana komunisme seksual tidak mendapat tempat untuk berpijak, demikian pula poliandri tidak dapat populer dalam masyarakat manapun. Oleh karena, kehidupan keluarga yang merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya merupakan tuntutan naluriah watak manusia.

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampai dengan 47. Pasal 42 mengatakan, anak yang adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu, adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang pokok perkawinan.

Begitu juga dengan masalah perkawinan kewarisan dan pengakuan anak, anak yang sah adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah juga.

Di dalam Fiqh banyak sekali terdapat status anak, sesuai dengan asal usul anak itu sendiri, dimana asal usul inilah yang nanti akan menentukan status dari seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberikan haknya, mengenai status anak berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut.

Masalah mengenai akibat hukumnya terhadap anak ini juga tertuang dalam pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”.

Pengecualian dan penjelasan KHI tersebut diatas menurut hemat kami adalah wajar dan tepat, sebab akibat negative dari pembatalan perkawinan itu jangan sampai diderita juga oleh orang-orang yang tidak berdosa dan beritikad baik. Dirasakan tidak adil jika sekiranya anak yang tadinya dianggap sah menjadi tidak sah karena pembatalan itu.

Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap anak sah, dan anak-anak itu dapat mewarisi dari ayah dan ibunya, anak itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah ataupun ibunya. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dan kedudukan dan pengakuan anak tetap berhak dan sah dalam perwalian dan mewarisi ayah ibunya.

Namun dalam kasus ini, karena perkawinan dilakukan dengan cara memalsukan akte cerai ini artinya tergugat melakukan kecurangan dengan sengaja, maka perkawinannya sudah jelas dilakukan dengan cara tidak sah. Dengan demikian batalnya perkawinan bukan karena ketidaktahuan tersebut dengan cara menipu/kecurangan. Selanjutnya bila anak lahir dalam perkawinan yang dilakukan dengan curang oleh perempuan berarti perempuan tersebut dengan sengaja melakukan perzinahan. Maka sendainya ada anak yang lahir dalam perkawinan perzinahan, anak tersebut juga adalah anak zina yang hanya dinasabkan pada ibunya saja.

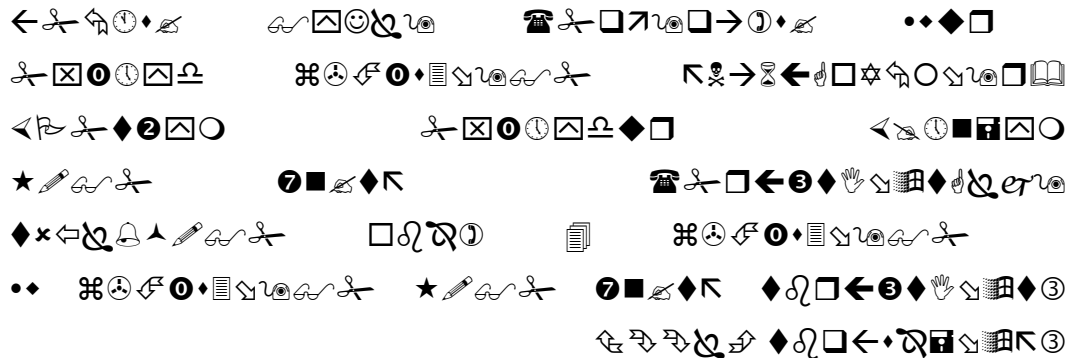
### **C. Analisis Hukum Islam Tentang Perkawinan yang dilakukan atas dasar penipuan Menurut Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr.**

Menurut hukum islam perkawinan yang dilakukan dengan cara menipu maka hukumnya haram dan tidak sah Quran sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh Al Quran sebagai karakter utama kemunafikan, dimana Al Quran telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman,dalam Alqur,an surat Annisa 145





Artinya:.”Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,. (yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,”(Q,S Adz. Dzariyaat 10-11)



Artinya.” dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.”(Q,S An Nahl 116)

Dengan adanya defenisi ayat di atas telah jelas bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan dengan cara menipu atau dengan cara curang maka perbuatan itu adalah dosa, Di dalam kasus ini Ibu Arneti binti Azim adalah seorang perempuan beralamat di Jl. Nuri III Gang Nusantara Nomor 227 (Perumahan Sidomulyo) RT.02 RW.12 Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Perempuan yang semenjak lahir beragama Islam ini bercerai dengan suaminya Bapak Asfial Bin Rifa'i tanggal 24 September 2004 dan menikah kembali di KUA Kecamatan Marpoyan Damai pada tahun 2006 dengan menggunakan akta cerai yang asli Nomor: 274/AC/2004/PA.Pbr tanggal 24 September 2004, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pada tanggal 14 mei 2009 Ibu Arneti binti Azim menikah dengan Sardiono, beralamat MS. S. Parman Gang Al-Khalis Nomor 29 RT.02, RW. 04 Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru (Akta Nikah Nomor: 66/08/V/2009).

Bahwa pernikahan Ibu Arneti binti Azim dengan Asfial Bin Rifa'i tersebut baru diketahui oleh Kepala KUA/PPN Kecamatan Sail Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2010 atas laporan Sardiono, dimana Ibu Arneti binti Azim telah hidup serumah dengan bekas suaminya Asfial Bin Rifa'i.

Ibu Arneti binti Azim menikah kembali dengan mantan suami pertamanya, bernama Asfial Bin Rifa'i dengan menggunakan akta cerai yang asli Nomor: 274/AC/2004/PA.Pbr tanggal 24 September 2004, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan pernikahan dengan Sardiono, Ibu Arneti binti Azim menggunakan copy akte cerai di legas di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 30 April 2009 dengan alasan akta cerai asli hilang yang dinyatakan oleh surat keterangan hilang dari polisi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh ibu Arneti tidak sah, dan di haramkan oleh agama karena melakukan perkawinan dengan cara menipu.

Terkait dengan praktek poliandri yang dilakukan Ibu Arneti binti Azim, menurut penulis sangat tidak sah karena salah satu mempelai tidak memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan. Tidak terpenuhinya syarat tersebut karena Arneti binti Azim masih memiliki ikatan perkawinan dengan bapak Asfial Bin Rifa'i. Hal ini tentu tidak berkesesuaian dengan syarat mempelai perempuan yakni tidak dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Arneti binti Azim dengan Bapak Sardiono adalah perkawinan yang dilakukan dengan "curang" dilakukan dengan memalsukan akta cerai.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa praktek poliandri dalam Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr antara Ibu Arneti binti Azim dengan Bapak Sardiono merupakan perkawinan yang haram. Keharaman ini karena perkawinan kedua Ibu Arneti binti Azim dilakukan dalam hubungan perkawinan yang masih sah dengan suami pertama yang merupakan larangan bagi wanita untuk melakukan perkawinan lagi sebelum adanya perceraian.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta pada saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Kelas I. A Pekanbaru memutuskan : <sup>49</sup>

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I Arneti Binti Azim dengan Tergugat II Sardiono Bin Ahmad Karno yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Sail Pekanbaru tanggal 14 mei 2009
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66 / 08 / V / 2009 tanggal 04 mei 2009 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hilang kini dihitung sebesar Rp.441.000., (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas para Tergugat tidak menjawab ataupun membantah bahkan mereka tidak pernah hadir di persidangan. Hal mana telah ada anggapan viksi hukum bahwa ketidakhadirannya tersebut harus dianggap mengakui dalil-dalil gugatan, sebab jika mereka tidak

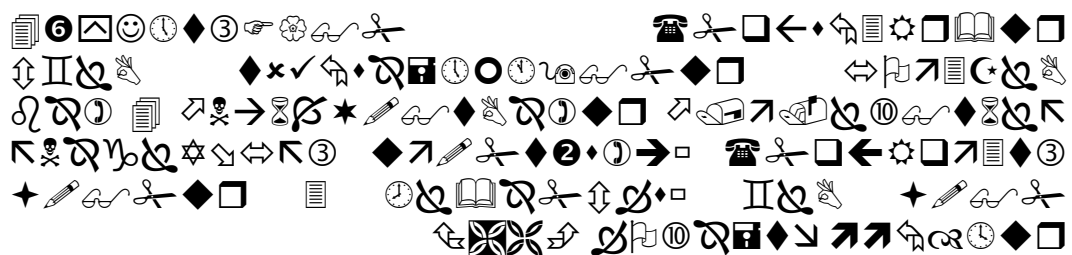
---

<sup>49</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang pembatalan Perkawinan, h. 12

mengakui atau membantah, tentulah mereka akan hadir di persidangan guna mengajukan bantahan-bantahannya/ keberatannya.

Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat I telah melangsungkan perkawinan secara poliandri/perkawinan yang kedua dengan Tergugat II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Sail Pekanbaru tanggal 14 mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/08/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dengan menggunakan copy akte cerai di legas di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 30 april 2009 dengan alasan akta cerai asli hilang yang dinyatakan oleh surat keterangan hilang dari Polisi sesuai dengan bukti P.6. dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan oleh tergugat I dan tergugat II di KUA Sail tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan” azas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dalam Q.S. An-Nuur ayat 32 dijelaskan sebagai berikut:



*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan*

*memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Dalam ayat tersebut Allah menyuruh kepada manusia supaya menikah, dan itu ditujukan bagi orang-orang sendirian artinya laki-laki yang tidak mempunyai istri ataupun bagi wanita yang tidak mempunyai suami, baik itu perawan maupun janda. Dan jangan khawatir dengan pernikahan tersebut apabila mereka miskin, sebab Allah justru akan memampukan mereka. Dengan karunia-Nya jika kamu memang orang-orang yang beriman dan bertaqwa, Karena kehidupan manusia akan dijamin oleh Allah asal manusia juga berusaha.

Praktek perkawinan dilarang karena akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan madllarat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr adalah tergugat I melangsungkan perkawinan secara poliandri/perkawinan yang kedua dengan Tergugat II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Sail Pekanbaru tanggal 14 mei 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66/08/V/2009 tanggal 04 Mei 2009 dengan menggunakan copy akte cerai di legas di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 30 april 2009 dengan alasan akta cerai asli hilang yang dinyatakan oleh surat keterangan hilang dari Polisi sesuai dengan bukti P.6.
2. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri Menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr, karena perkawinan dilakukan dengan cara memalsukan akte cerai ini artinya tergugat melaukan kecurangan dengan sengaja, maka perkawinannya sudah jelas dilakukan dengan cara tidak sah. Dengan demikian batalnya perkawinan bukan karena ketidaktahuan tersebut dengan cara menipu/kecurangan. Selanjutnya bila anak lahir dalam perkawinan yang dilakukan dengan curang oleh perempuan berarti perempuan tersebut dengan sengaja melakukan perzinahan. Maka sendainya

ada anak yang lahir dalam perkawinan perzinahan, anak tersebut juga adalah anak zina yang hanya dinasabkan pada ibunya saja.

3. Praktek poliandri dalam Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr antara Ibu Arneti binti Azim dengan Bapak Sardiono merupakan perkawinan yang haram. Keharaman ini karena perkawinan kedua Ibu Arneti binti Azim dilakukan dalam hubungan perkawinan yang masih sah dengan suami pertama yang merupakan larangan bagi wanita untuk melakukan perkawinan lagi sebelum adanya perceraian. Praktek perkawinan dilarang karena akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan madllarat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi istri yang melakukan perkawinan poliandri dengan cara memalsukan akte cerai, hendaknya menghentikan perkawinan keduanya, agar terhindar dari perbuatan zina. Jika memang ingin juga untuk melakukan perkawinan yang kedua, hendaknya menceraikan suami terlebih dahulu melalui pengadilan



agama setempat, yaitu cerai gugat, dan mengulangi nikah yang dilakukan terhadap suami kedua.

2. Agar perkawinan yang dilakukan dengan cara memalsukan akte cerai tidak terjadi lagi, sebaiknya pihak yang berwenang lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan
3. Perlunya memberikan pemahaman pada setiap anggota masyarakat terkait dengan hakikat sebuah perkawinan, terutama tentang bentuk perkawinan yang dianjurkan, dan perkawinan yang dilarang, supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya pemahaman akan pernikahan poliandri.

## DAFTAR KE PUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Abdul manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004.
- Busahar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- H.E. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat Ahkam Rajawali Pres*, Jakarta, 2008.
- Imam Al Ghozali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*. Kharisma. Bandung. 1995.
- J.Prins. *Tentang Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press. Jakarta, 1997.
- Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta. 2007.
- M.Ali Ash- Shobuni, *perkawinan Islam*, terj. Ahmad Nurrahim, Mumtaza, Solo, 2008.
- Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- R Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung. 1981.
- Saifullah al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Terbit Terang, Surabaya, 2005.

Sayyid Qutub, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj.As'ad Yasin dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1991.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pedata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 2002.

Sulaikan lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Wantjik Saleh K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.